

DAMPAK TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PT
ANTAM TBK PADA MASYARAKATPutu Caesar Waradana¹, Kadek Dimas Pramudya², Riska³.Email: waradanaputucaesar@gmail.com , kadekdimaspramudya19@gmail.com2 ,
sumastriandariska@gmail.com

Universitas Bandar Lampung

Abstrack

Corruption is one of the fundamental problems that threatens the stability of the economy, government, and social life of the community. Criminal acts of corruption not only harm state finances, but also reduce the level of public trust in state institutions, including State-Owned Enterprises (BUMN). One real example of a corruption case in the BUMN sector occurred at PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam Tbk), which has tarnished the company's reputation and caused significant losses. This study aims to analyze the impact of criminal acts of corruption at PT Antam Tbk on society in terms of economy, social, and public trust. This study uses a qualitative method with a descriptive approach to describe the impact that occurs as a whole. The results of the study show that the corruption case at PT Antam Tbk has a direct impact on state financial losses, declining company performance, and decreasing public trust in the government and BUMN in general. Strict law enforcement and strengthening of the internal supervision system are needed to prevent similar incidents in the future.

Keywords: Corruption, PT Antam Tbk, BUMN, Social Impact, Public Trust.

Article History

Received: June 2025
Reviewed: June 2025
Published: June 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Penelitian menunjukkan bahwa kasus korupsi di PT Antam Tbk berdampak langsung pada kerugian keuangan negara. Korupsi merupakan salah satu permasalahan mendasar yang mengancam stabilitas ekonomi, pemerintahan, serta kehidupan sosial masyarakat. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu contoh nyata kasus korupsi di sektor BUMN terjadi pada PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam Tbk), yang telah mencoreng reputasi perusahaan serta menimbulkan kerugian yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tindak pidana korupsi di PT Antam Tbk terhadap masyarakat dari segi ekonomi, sosial, dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dampak yang terjadi secara menyeluruh. Hasil, menurunnya kinerja perusahaan, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta BUMN secara umum. Diperlukan penegakan hukum yang tegas serta penguatan sistem pengawasan internal untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kata kunci: Korupsi, PT Antam Tbk, BUMN, Dampak Sosial, Kepercayaan Publik.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena yang kompleks dan merusak hampir seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah sistemik yang tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, hingga politik. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketimpangan sosial, dan menurunkan kualitas layanan publik. ¹Salah satu sektor yang sangat rentan terhadap praktik korupsi adalah

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kajian Sistemik: Potensi Korupsi dalam Tata Kelola Pertambangan di Indonesia (Jakarta: KPK RI, 2020).

sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjalankan fungsi ekonomi dan pelayanan publik, BUMN memiliki posisi strategis yang seharusnya menjadi pilar pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit BUMN yang tersandung kasus korupsi, salah satunya adalah PT Aneka Tambang Tbk atau PT Antam Tbk.

PT Antam Tbk merupakan perusahaan tambang yang beroperasi dalam pengelolaan logam mulia seperti emas, nikel, dan bauksit. Sebagai entitas milik negara yang berstatus terbuka (Tbk), PT Antam memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada negara sebagai pemilik utama, tetapi juga kepada publik sebagai pemegang saham. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini tersandung kasus korupsi yang cukup besar, melibatkan manipulasi data dan penggelapan dalam transaksi logam mulia yang berdampak pada kerugian negara yang sangat signifikan.² Kasus ini mencerminkan lemahnya tata kelola perusahaan, kurangnya pengawasan internal, serta minimnya integritas individu di dalam struktur manajerial perusahaan.

Masalah korupsi pada PT Antam Tbk menjadi sangat penting untuk dikaji karena memiliki dampak multidimensi. Dari sisi ekonomi, korupsi menyebabkan pemborosan anggaran negara, menurunkan kinerja dan produktivitas perusahaan, serta menciptakan ketidakpastian dalam dunia usaha. Dari sisi sosial, korupsi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi perusahaan. Selain itu, rusaknya citra perusahaan negara turut merusak citra pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat.³ Tidak kalah penting adalah dampak psikologis berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dan hukum.

Kajian ini menjadi penting dalam upaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana korupsi di perusahaan negara tidak hanya sekadar tindakan ilegal, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Korupsi di BUMN berbeda dengan korupsi di sektor swasta karena kerugian yang ditimbulkan secara langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penanggulangan yang bersifat sistemik dan partisipatif, yang melibatkan tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi juga peran serta masyarakat dan media sebagai pengawas independen.

Penelitian ini difokuskan pada analisis dampak tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Antam Tbk terhadap masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun reputasi negara. Penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi untuk pencegahan dan perbaikan tata kelola di masa yang akan datang, demi terciptanya BUMN yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang diatas Inilah Rumusan Masalah Yang Kami Ambil:

1. Apa saja akibat dari tindak pidana korupsi di PT Antam Tbk terhadap masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial?

² Tempo, "Skandal Korupsi di PT Antam: Kronologi, Aktor, dan Dampaknya," Tempo.co, diakses 9 Juni 2025, <https://www.tempo.co>.

³ Firdaus, M., Korupsi dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh mengenai fenomena yang terjadi, terutama terkait dampak korupsi di PT Antam Tbk terhadap masyarakat. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengukur secara numerik, melainkan untuk memahami makna, interpretasi, dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa.⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber, seperti berita resmi dari media massa, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang relevan.⁵ Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji isi dari dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan kasus korupsi di PT Antam Tbk. Analisis ini berfokus pada identifikasi dampak-dampak yang terjadi terhadap masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶

Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber berbeda untuk memastikan konsistensi dan keakuratannya. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh PT Antam Tbk, sebagai salah satu BUMN strategis yang bergerak di sektor pertambangan, telah menimbulkan berbagai dampak serius terhadap masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi dalam perusahaan milik negara bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi yang seharusnya menjadi hak public.⁷

Dampak Ekonomi terhadap Masyarakat

Secara ekonomi, korupsi yang terjadi di PT Antam Tbk berakibat pada hilangnya potensi pendapatan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dana yang semestinya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial, justru bocor akibat praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum internal perusahaan maupun mitra usaha yang terlibat.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Sistemik: Potensi Korupsi dalam Tata Kelola Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: KPK, 2020), hlm. 12–15.

⁶ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2013), hlm. 30–33.

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Sistemik: Potensi Korupsi dalam Tata Kelola Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: KPK, 2020), hlm. 5.

Beberapa dampak ekonominya meliputi:

1. Lesunya pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Tindak korupsi di suatu negara dapat menciptakan ketidakpercayaan di kalangan investor asing terhadap kepastian hukum, yang berdampak negatif pada keinginan mereka untuk berinvestasi di industri negara tersebut. Akibatnya, hal ini akan menghambat pembangunan ekonomi. Di sektor swasta, korupsi membawa kerugian signifikan bagi dunia usaha, mulai dari pembayaran ilegal, risiko pembatalan kontrak akibat penyelidikan, hingga biaya manajemen yang timbul dalam negosiasi dengan pejabat.

Korupsi menciptakan ketimpangan ekonomi di kalangan masyarakat, karena para pemegang kekuasaan cenderung mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek besar dan perusahaan yang rentan terhadap praktik suap. Pejabat publik menciptakan situasi dan regulasi yang rumit, terutama terkait proyek-proyek di sektor publik, serta membuka celah untuk melakukan transaksi yang tidak transparan. Akibatnya, iklim investasi semakin terdistorsi dan hanya menguntungkan segelintir orang. Korupsi juga menyebabkan pengabaian terhadap aturan hukum, melemahkan kepatuhan terhadap regulasi, dan berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik serta menghambat Pembangunan infrastruktur yang seharusnya menguntungkan masyarakat luas.⁸

Dampak Sosial terhadap Masyarakat

Selain kerugian ekonomi, korupsi juga berdampak secara sosial. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara, termasuk BUMN yang seharusnya menjadi garda depan dalam pelayanan dan pembangunan. Ketika masyarakat mengetahui adanya praktik korupsi di BUMN, muncul persepsi negatif bahwa semua lembaga negara tidak bersih dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.⁹

Dampak sosial yang timbul antara lain:

1. Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik

Korupsi berdampak pada tingginya biaya ekonomi, yang pada gilirannya membebani para pelaku ekonomi. Ketidakstabilan biaya ini berpengaruh terhadap harga jasa dan pelayanan publik. Harga yang ditetapkan mencerminkan kebutuhan untuk menanggung kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan dana yang berkaitan dengan tindakan korupsi.

2. Lambatnya Pengentasan Kemiskinan

Korupsi dan kemiskinan pada akhirnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses lapangan kerja, terutama yang disebabkan oleh latar belakang pendidikan. Selain itu, Ketika mencoba menciptakan pekerjaan sendiri, banyak individu menghadapi kendala yang berkaitan dengan keterampilan, masalah teknis, dan pendanaan.

3. Akses bagi Masyarakat Miskin menjadi Terbatas

Korupsi yang merajalela dan mencengkeram berbagai aspek kehidupan telah menyebabkan ekonomi menjadi semakin mahal, dengan harga-harga yang terus melambung jauh melebihi

⁸ Zainudin Hasan. 2025. *Pend Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, hal 55

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 88.

jangkauan masyarakat miskin. Kondisi ini menyebabkan masyarakat rentan semakin kesulitan dalam mengakses beragam kebutuhan hidup mereka.¹⁰

Refleksi terhadap Peran BUMN

BUMN seperti PT Antam Tbk seharusnya menjadi alat negara dalam menjalankan fungsi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Namun, ketika perusahaan BUMN justru menjadi tempat subur praktik korupsi, maka fungsi tersebut gagal tercapai.¹¹ Masyarakat, yang menjadi pemilik tidak langsung dari perusahaan negara, justru menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.¹²

Oleh karena itu, penting untuk menekankan bahwa dampak korupsi tidak hanya soal angka kerugian negara, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan martabat negara di mata rakyatnya.¹³

Kasus-kasus korupsi di tubuh BUMN telah memperlihatkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan tersebut.¹⁴

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Antam Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam aspek ekonomi, masyarakat dirugikan karena terhambatnya distribusi manfaat dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik bersama. Dana yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat justru hilang akibat tindakan koruptif, sehingga memperlebar kesenjangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Secara sosial, korupsi di PT Antam Tbk merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara dan menciptakan persepsi negatif terhadap pengelolaan perusahaan milik negara. Masyarakat menjadi skeptis terhadap keberpihakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan nasional. Lebih jauh, korupsi menciptakan ketidakadilan sosial di mana kelompok tertentu diuntungkan secara tidak sah, sementara rakyat kecil menjadi korban dari kegagalan sistemik dalam tata kelola BUMN.

Dengan demikian, korupsi di lingkungan BUMN seperti PT Antam Tbk bukanlah kejahatan yang berdampak internal semata, melainkan kejahatan yang menggerus hak publik dan menghambat pencapaian tujuan negara dalam menyejahterakan rakyat. Pencegahan dan penindakan terhadap praktik korupsi harus menjadi prioritas agar BUMN benar-benar dapat

¹⁰ Zainudin Hasan. 2025. *Pend Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, hal 66

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Sistemik: Potensi Korupsi dalam Tata Kelola BUMN di Indonesia* (Jakarta: KPK, 2021), hlm. 10.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 145.

¹³ M. Busyro Muqoddas, *Korupsi Mengorupsi Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 23.

¹⁴ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023* (Jakarta: BPK RI, 2023), hlm. 55.

menjalankan perannya sebagai penggerak pembangunan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Komisi Pemberantasan Korupsi, Kajian Sistemik: Potensi Korupsi dalam Tata Kelola Pertambangan di Indonesia (Jakarta: KPK, 2020), hlm. 12–15.
- Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2013), hlm. 30–33.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 (Jakarta: BPK RI, 2023), hlm. 47.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 (Jakarta: BPK RI, 2023), hlm. 55.
- Firdaus, M., *Korupsi dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 145.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kajian Sistemik: Potensi Korupsi dalam Tata Kelola Pertambangan di Indonesia (Jakarta: KPK RI, 2020).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Kajian Sistemik: Potensi Korupsi dalam Tata Kelola Pertambangan di Indonesia (Jakarta: KPK, 2020), hlm. 5.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Kajian Sistemik: Potensi Korupsi dalam Tata Kelola BUMN di Indonesia (Jakarta: KPK, 2021), hlm. 10.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.
- M. Busyro Muqoddas, *Korupsi Mengorupsi Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 23.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.88.
- Tempo, “Skandal Korupsi di PT Antam: Kronologi, Aktor, dan Dampaknya,” Tempo.co, diakses 9 Juni 2025, <https://www.tempo.co>.
- Zainudin Hasan. 2025. Pend Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0, hal 55
- Zainudin Hasan. 2025. Pend Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0, hal 66